



**KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA**

**PENGUMUMAN
PENERIMAAN USULAN CALON HAKIM AGUNG PERIODE II TAHUN 2017
Nomor: 10/PENG/PIM/RH.01.02/11/2017**

Komisi Yudisial mengundang Mahkamah Agung, Pemerintah, dan Masyarakat untuk mengusulkan warga negara terbaik untuk menjadi hakim agung Kamar Perdata, Pidana, Tata Usaha Negara (diutamakan mempunyai keahlian hukum pajak), dan Militer yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Hakim karier:

1. Warga Negara Indonesia;
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Berijazah magister di bidang hukum dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum;
4. Berusia sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) tahun;
5. Mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban;
6. Berpengalaman paling sedikit 20 (dua puluh) tahun menjadi hakim, termasuk menjadi hakim tinggi; dan
7. Tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara akibat melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim.

b. Nonkarier:

1. Warga Negara Indonesia;
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Berijazah doktor dan magister di bidang hukum dengan keahlian di bidang hukum tertentu dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum;
4. Berusia sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) tahun;
5. Mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban;
6. Berpengalaman dalam profesi hukum dan/atau akademisi hukum paling sedikit 20 (dua puluh) tahun;
7. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
8. Tidak pernah dijatuhi sanksi pelanggaran disiplin.

Pengusulan calon Hakim Agung dapat diajukan tanggal **20 November s.d. 12 Desember 2017** dan ditujukan kepada **KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA u.p. SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI CALON HAKIM AGUNG REPUBLIK INDONESIA**, dapat diantar langsung atau dikirim melalui pos ke **KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA, Jl. Kramat Raya No. 57, Jakarta Pusat 10450 Telp: (021) 3905876-77 / 31903661 Fax: (021) 31903661- paling lambat tanggal 12 Desember 2017 pukul 16.00 WIB** (stempel pos), dengan melampirkan data-data sebagai berikut:

1. Surat pengusulan;
2. Daftar riwayat hidup, termasuk riwayat pekerjaan dan/atau pengalaman organisasi;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
4. Pasfoto terbaru sebanyak 3 (tiga) lembar ukuran 4x6 (dengan latar belakang warna merah);
5. Fotokopi ijazah beserta transkrip yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
6. Surat keterangan sehat rohani dan jasmani dari dokter rumah sakit pemerintah;
7. Surat pernyataan berpengalaman dalam bidang hukum paling sedikit 20 (dua puluh) tahun dengan melampirkan salinan surat keputusan pengangkatan/kontrak/perjanjian kerja;
8. Tanda terima penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari KPK;
9. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
10. Surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari pengadilan negeri setempat, bagi calon hakim agung yang berasal dari non karier;
11. Surat keterangan tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara atau sanksi pelanggaran disiplin dari instansi/lembaga asal calon;
12. Surat pernyataan tidak akan merangkap jabatan dan menjadi pimpinan/pengurus partai politik atau organisasi massa yang memiliki afiliasi dengan partai politik, atau jabatan lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan di atas kertas bermaterai, jika diterima menjadi hakim agung;
13. Surat pernyataan kesediaan mengikuti proses seleksi calon hakim agung;
14. Surat pernyataan kamar peradilan yang dipilih (Perdata, Pidana, Tata Usaha Negara, dan Militer); dan
15. Surat pernyataan tidak pernah mengikuti seleksi calon hakim agung dua kali secara berturut-turut.

Seleksi dilakukan secara bertahap, meliputi: seleksi administrasi, seleksi kualitas, seleksi kesehatan dan kepribadian, dan wawancara.

Ketentuan lain-lain:

1. Bagi calon yang telah mengikuti seleksi calon hakim agung dua kali berturut-turut pada tahun 2016 dan 2017 tidak dapat mengikuti seleksi periode ini;
2. Berkas pengusulan yang sudah dikirim kepada Panitia Seleksi tidak dapat dikembalikan;
3. Bagi calon yang lulus seleksi administrasi pada Seleksi Calon Hakim Agung tahun 2017 periode pertama, tidak perlu memperbaharui persyaratan administrasi pada poin 2, 3, 5, 8, dan 9, kecuali ada perubahan atau telah habis masa berlakunya;
4. Dalam proses seleksi, peserta tidak dipungut biaya apapun;
5. Peserta seleksi yang memenuhi persyaratan administratif akan dipanggil untuk mengikuti tahapan seleksi berikutnya;
6. Peserta seleksi diminta untuk mengabaikan pihak-pihak yang menjanjikan dapat membantu keberhasilan/kelulusan dalam proses seleksi;
7. Formulir-formulir surat keterangan dapat diakses melalui website Komisi Yudisial RI **www.komisiyudisial.go.id**.

Jakarta, 20 November 2017

Ketua



Prof. Dr. Aidul Fitriadi Azhari, S.H., M.Hum.

KOP SURAT INSTANSI/ORGANISASI/LEMBAGA PENGUSUL

Nomor :2017
 Sifat :
 Lamp : 1 (satu) berkas
 Perihal : Pengusulan Calon Hakim Agung

Kepada Yth.
 Ketua Panitia Seleksi Calon Hakim Agung
 Republik Indonesia
 Jln. Kramat Raya No. 57, Jakarta Pusat

Sehubungan dengan dibukanya pendaftaran seleksi calon hakim agung yang diselenggarakan oleh Komisi Yudisial RI, dengan ini (*nama lembaga pengusul*) mengusulkan calon hakim agung sebagai berikut:

No.	Nama	Tempat/Tgl Lahir	Pangkat/Gol	Jabatan	Telp/HP

Adapun pertimbangan kami, karena yang bersangkutan memiliki kompetensi di bidang hukum (Perdata, Pidana, Tata Usaha Negara, dan Militer)* serta integritas, moralitas dan nurani yang baik untuk mengemban tugas sebagai Hakim Agung Republik Indonesia.

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kelengkapan persyaratan administratif calon Hakim Agung yang bersangkutan.

Demikian, atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Tanda tangan dan
 Cap instansi/lembaga pengusul

(.....)

*Coret yang tidak perlu

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. DATA DIRI

Nama Lengkap	:	
Tempat dan Tgl. Lahir	:	
NIP / NRP *	:	
No. KTP	:	
Agama	:	
Status Perkawinan	:	
Jenis Kelamin	:	
Alamat Rumah Tinggal (KTP) yang ditempati Keluarga	:	
Alamat Domisili	:	
Nomor Telepon Rumah	:	
Nomor HP	:	
Alamat e-mail	:	
Unit Kerja	:	
Alamat Instansi/Kantor	:	
Nomor Telepon Kantor	:	
Jabatan	:	

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

No	Jenjang	Fakultas	Universitas/Sekolah	Tahun Lulus
1.	S1			
2.	S2			
3.	S3			

III. DATA ANGGOTA KELUARGA

No	Nama	Tempat, Tgl Lahir	Hubungan	Pekerjaan	Alamat
1.			Istri/Suami		
2.			Anak		
3.			Anak		
4.			Dst		

IV. RIWAYAT JABATAN

No	Jabatan	Instansi	TMT Pelantikan	No. SK	Tanggal SK
1.	Hakim Agama	PA. BLITAR	28/06/1997	BII/3/10499/1997	20/05/1997
2.					
3.					
dst					

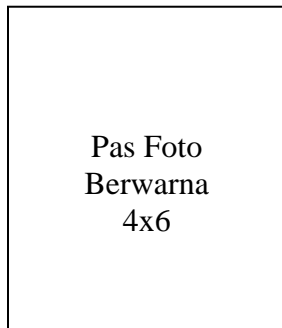
***) TMT (Terhitung Mulai Tanggal), jika tidak ada pelantikan maka menggunakan Tanggal mulai melaksanakan Tugas**

V. RIWAYAT TINDAKAN DISIPLIN

No	Jenis Tindakan Disiplin	Keterangan Masalah	Tgl. Mulai	Tgl. Akhir
1.				
2.				
3.				
dst				

VI. ORGANISASI

No	Nama Organisasi	Kedudukan dlm Org.	Dari s.d. Tahun	Tempat Org.
1.				
2.				
3.				
dst				



(Tempat, Tanggal Bulan Tahun)

materai

(Nama Lengkap CHA)

**SURAT PERNYATAAN PENGALAMAN KERJA
(Karier)**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : _____
 Tempat/Tanggal Lahir : _____
 Pekerjaan terakhir : _____
 Jabatan : _____
 Alamat (sesuai KTP) : _____

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah bekerja selama tahun sebagai hakim, termasuk menjadi hakim tinggi selama tahun, dengan rincian sebagai berikut :

I. Pengalaman Kerja Sebagai Hakim

No.	URAIAN	Mulai s.d Akhir (Tgl, Bln, Thn)
1	 s.d
2		
3		
dst		

II. Pengalaman Kerja Sebagai Hakim Tinggi

No.	Uraian	Mulai s.d Akhir (Tgl, Bln, Thn)
1	 s.d
2		
3		
dst		

dibuktikan dengan **melampirkan fotokopi Surat keputusan** pengangkatan sebagai hakim dan berita acara pelantikan sebagai hakim tinggi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan saya bertanggungjawab atas segala konsekuensi hukumnya.

.....2017
 Yang membuat pernyataan

Materai Rp. 6.000

(Nama Lengkap CHA)

**SURAT PERNYATAAN PENGALAMAN KERJA
(Nonkarier)**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : _____
 Tempat/Tanggal Lahir : _____
 Pekerjaan terakhir : _____
 Jabatan : _____
 Alamat (sesuai KTP) : _____

Dengan ini saya menyatakan, telah bekerja selama tahun dalam bidang hukum, dengan rincian sebagai berikut:

No.	PENGALAMAN KERJA	MULAI S.D. AKHIR (Tgl, Bln, Thn)
1	 s.d
2		
3		
dst		

dibuktikan dengan **melampirkan surat pengalaman kerja** dari instansi terkait.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan saya bertanggung jawab atas segala konsekuensi hukumnya.

.....2017

Yang membuat pernyataan

Materai Rp. 6.000

(.....)

KOP PENGADILAN

**SURAT KETERANGAN
TIDAK PERNAH DIHUKUM PENJARA ATAU KURUNGAN
(Nonkarier)**

Pengadilan, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : _____
Tempat/Tanggal Lahir : _____
Pekerjaan terakhir : _____
Jabatan : _____
Alamat (sesuai KTP) : _____

Setelah diadakan penelitian hingga dikeluarkannya surat keterangan ini yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 2017

Nama
NIP.....

KOP MAHKAMAH AGUNG RI
BADAN PENGAWASAN

**SURAT KETERANGAN
TIDAK PERNAH DIJATUHI SANKSI PEMBERHENTIAN SEMENTARA
(KARIER)**

Mahkamah Agung RI, dengan ini menerangkan bahwa:

No	Nama	Tempat, Tanggal Lahir	Jabatan terakhir	Alamat
1.				
2.				
3.	Dst.			

Setelah diadakan penelitian hingga dikeluarkannya surat keterangan ini, hakim sesuai nama tersebut di atas tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara akibat melakukan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,

2017

Nama

NIP.....

KOP INSTANSI PENGUSUL

**SURAT KETERANGAN
TIDAK PERNAH DIJATUHI SANKSI PELANGGARAN DISIPLIN
(NONKARIER)**

(nama Instansi), dengan ini menerangkan bahwa:

No	Nama	Tempat, Tanggal Lahir	Jabatan Terakhir	Alamat
1.				
2.				
3.	Dst.			

Setelah diadakan penelitian hingga dikeluarkannya surat keterangan ini, nama tersebut di atas tidak pernah dijatuhi sanksi akibat melakukan pelanggaran disiplin.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,

2017

Nama
NIP.....

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK AKAN MERANGKAP JABATAN DAN
MENJADI PENGURUS PARTAI POLITIK/ORGANISASI MASSA YANG
MEMILIKI AFILIASI DENGAN PARTAI POLITIK**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : _____
Tempat/Tanggal Lahir : _____
Pekerjaan terakhir : _____
Jabatan : _____
Alamat (sesuai KTP) : _____

Dengan ini menyatakan bahwa jika saya terpilih sebagai hakim agung, maka saya tidak akan merangkap sebagai pejabat negara, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, pengusaha, karyawan badan usaha milik negara/daerah atau badan usaha milik swasta, pimpinan/pengurus partai politik atau organisasi massa yang memiliki afiliasi dengan partai politik atau jabatan lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan saya bertanggungjawab atas segala konsekuensi hukumnya.

.....2017

Yang membuat pernyataan

Materai Rp. 6.000

(.....)

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MENGIKUTI PROSES SELEKSI CALON HAKIM AGUNG**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : _____
Tempat/Tanggal Lahir : _____
Pekerjaan terakhir : _____
Jabatan : _____
Alamat (sesuai KTP) : _____

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia mengikuti seluruh proses seleksi calon Hakim Agung yang dilaksanakan oleh Komisi Yudisial RI dan apabila saya mengundurkan diri setelah terpilih menjadi calon Hakim Agung, maka saya bersedia mengganti biaya seleksi yang telah dikeluarkan oleh Negara.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan saya bertanggung jawab atas segala konsekuensi hukumnya.

.....2017

Yang membuat pernyataan

(.....)

**SURAT PERNYATAAN
PILIHAN KAMAR PERADILAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : _____
Tempat/Tanggal Lahir : _____
Pekerjaan terakhir : _____
Jabatan : _____
Alamat (sesuai KTP) : _____

Dengan ini menyatakan bahwa kamar peradilan yang saya pilih adalah:

- Perdata
- Pidana
- Tata Usaha Negara
- Agama
- Militer

(Pilih salah satu dengan mencontreng)

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian saya dibidang hukum.

.....2017

Yang membuat pernyataan

(.....)

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH MENGIKUTI SELEKSI CALON HAKIM AGUNG 2 KALI
BERTURUT-TURUT**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : _____
Tempat/Tanggal Lahir : _____
Pekerjaan terakhir : _____
Jabatan : _____
Alamat (sesuai KTP) : _____

Dengan ini menyatakan bahwa saya tidak pernah mengikuti seleksi calon Hakim Agung selama dua kali secara berturut-turut sebelumnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan saya bertanggung jawab atas segala konsekuensi hukumnya.

.....2017

Yang membuat pernyataan

(.....)

REKOMENDASI

Pemberi Rekomendasi

- a. Nama :
- b. Alamat :
- c. Pekerjaan :
- d. Nomor HP :
- e. Hubungan dengan calon :
- f. Lama hubungan dengan calon :

Memberikan Rekomendasi kepada: (nama calon hakim agung)

Terkait dengan integritas, kualitas, dan kinerja dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Integritas:

.....
.....
.....
.....
.....

2. Kualitas:

.....
.....
.....
.....
.....

3. Kinerja :

.....
.....
.....
.....
.....

.....2017

(.....)